

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)**



**OLEH :  
ADRYAN MAHAPUTRA  
B111 11 431**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ADRYAN MAHAPUTRA  
B111 11 431**

pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA**  
**BERLANJUT**

(Studi Kasus Putusan No. 337/PID.B/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

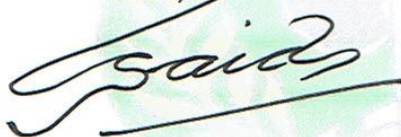
**ADRYAN MAHAPUTRA**

**B111 11 431**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian studi program sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat 31 Maret 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

Ketua,



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si**

NIP. 19680411 199203 1 001

Sekretaris,



**Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.**

NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**

NIP : 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ADRYAN MAHAPUTRA**

Nim : **B111 11 431**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

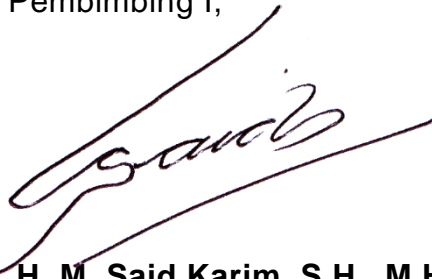
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus  
Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.

Makassar, Januari 2017

Disetujui oleh,

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si**  
NIP. 19680411 199203 1 001

Pembimbing II



**Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H**  
NIP. 19800710 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

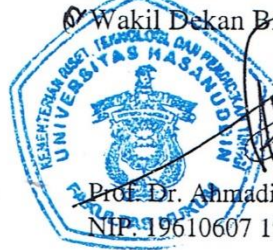
Nama : ADRYAN MAHAPUTRA  
Nomor Pokok : B111 11 431  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No: 337/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

ADRYAN MAHAPUTRA (B111 11 431), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks). Di bawah Bimbingan H.M. Said Karim selaku Pembimbing I dan H. Amir Ilyas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara berlanjut dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen, wawancara dilakukan langsung dengan hakim yang terkait dengan kasus ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penerapan hukum materil pada Putusan No.337/Pid.B/2016/ PN.Mks menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana atau dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHPidana. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No.337/Pid.B/2016/PN.Mks. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

## KATA PENGANTAR



Assalamuakaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor: 337/Pid.B/2016/PN.Mks)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua, Ayahanda tercinta Boedhi Al-Fudri dan Ibunda tercinta Hasriyanti atas doa yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Kepada saudara-saudaraku tercinta Dyan Maharani, Muh.Zul Fauzi, Raisa Humairah serta Keluarga Besar Penulis terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau

senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Unhas
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., M.H sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Muhadar, S.H.,M.S Ibu Dr. Nur Azizah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Haeranah , S.H., M.H selaku penguji.
5. Seluruh staf dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu.
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
7. Buat saudara-saudaraku Ahya Ahmadan, Ahmad Arismunandar, Darmawangsyah Asis, Moh. Noor Qadri, Yogi Wira Wicaksono, Jus Hardianto, Tri Febri Handoko, Hadrian Tri Saputra, Muhlis, Aidir Ali, Muh. Arfan, Muhammad Sutrisno Yani, Panji Catur Prasetya, Riady Jufri, Muh. Irfan Umar, Muh. Faisal Tanjung yang telah menjadi teman, sahabat,



serta saudara selama perjalanan kita di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Buat kakak-kakak penulis Ardiansyah Kandow, S.H., Yudhi Banto, S.H., Rahmatullah, S.H., Hadi Zulkarnaen, S.H., Arlo Abdillah, S.H., Eko Saputra, S.H yang selalu membimbing dan memberi dorongan kepada penulis..
9. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang Terlahir melalui proses Kebersamaan hingga kami menjadi Saudara mulai dari Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum hingga akhir hayat penulis (KBLH).
10. Buat Teman-Teman Dan Senior IMS (Ikatan Mahasiswa Sawerigading) yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Buat Teman-Teman Pabertel selaku pemberi dorongan terhadap penulis selama perkuliahan hingga saat ini.
12. Teman-teman angkatan dan teman seperjuangan penulis MEDIASI 2011.
13. Seluruh Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KEMA-FHUU).
14. Teman-teman KKN Gelombang 87 Kabupaten Enrekang Kecamatan Enrekang Desa Leoran.
15. Teman-teman Alumni SMA Negeri 3 Palopo Tahun 2011 yang sampai saat ini masih setia menjadi teman penulis.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi

baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, Januari 2017

Adryan Mahaputra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Yuridis .....	7
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	11
3. Jenis Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP .....	15
4. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
5. Jenis Delik Tindak Pidana .....	27
C. Tindak Pidana Penipuan .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	31
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	37
1. Pertimbangan Yuridis .....	37
2. Pertimbangan Sosiologis .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Jenis dan Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	43
D. Teknik Analisis Data .....	44
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>45</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 337/Pid.B/2016/Pn.Mks. ....	45
1. Posisi Kasus .....	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	52
4. Amar Putusan .....	52
5. Analisis Penulis.....	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks .....	54
1. Pertimbangan Hakim.....	55
2. Analisis Penulis .....	65
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidak enakn masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi bagi seseorang yang

dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Moeljatno (2000:3) Berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Karena itu ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.

Kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya, sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan social dan agama, kalau ada orang yang melanggar pernyataan ini baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, maka ia akan dikenakan sanksi. Hanya saja yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dari kegiatan yang dikerjakan dan wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa

adil oleh masyarakat. Jadi setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang undang serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu maka setiap orang yang mampu memberi pertanggung jawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk meringankan hukuman.

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana dilakukan orang guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum, diantaranya tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms ataupun dengan internet. Banyak modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Penipuan tersebut telah lama meresahkan masyarakat, banyak sudah orang yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pula pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan tindak pidana penipuan ini untuk terus melakukan aksinya.

Mengingat masalah tindak pidana penipuan diseluruh Indonesia sering terjadi terutama di kota-kota besar yang melanda masyarakat, dan tidak luput pula didaerah Kota Makassar yang termasuk daerah hukum peradilan negeri Makassar, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana penipuan dengan judul skripsi : “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus : 337/Pid.B/2016/ PN.Mks)”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Tindak Pidana “Penipuan”.

2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan Hukum di Indonesia khususnya dalam menangani kasus Tindak Pidana “Penipuan”.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, maka penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1991:1198) Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Sedangkan menurut Kamus Hukum (1977 : 493) yuridis berasal dari kata *jurisdictie*; *Rechtmacht* (Bid.), *jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur*; *Rechtspraak* (Bid.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Adami Chazawi (2002:67) Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan pidana yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Hak Cipta), UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan lainnya.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, H. J. Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (Dalam Buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 13/Drt/1952 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.

Simons (I Made Windyana, 2010:34) menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Achmad Ali (2002:192) mengemukakan bahwa suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun

hukum publik, termasuk hukum pidana”.

Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Menurut Hezewinkel Suringa *Strafbaarfeit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Jonkers (Adami Chazawi, 2001:75) merumuskan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 2010:225) bahwa “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld te wijten*)”.

Menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Selanjutnya menurut pompe, pengertian strafbaarfeit dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **2. Teori dan Tujuan Pemidanaan**

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan itu, tetapi yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar. Antonius Sudirman (2009: 107-112), mengemukakan ke 3 (tiga) teori itu sebagai berikut:

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien);
- b) Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien); dan
- c) Teori gabungan (Verenigings Theorien).

### **a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)**

Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penganjur teori ini adalah Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah

perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, A. Fuad Usfa (Erdianto Effendi, 2011: 142), yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian dan kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.



## **b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)**

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan sangat kontras dengan teori absolut. Jika dalam teori absolut, tindakan pembedaan dihubungkan dengan kejahatannya, maka dalam teori tujuan ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu, Samidjo (Erdianto Effendi: 2011: 143), membagi kedalam tiga teori, yaitu:

1. Untuk menakuti;  
Teori dari Anselm von Reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu adalah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.
2. Untuk memperbaiki;  
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (speciale prevensi/pencegahan khusus).
3. Untuk melindungi  
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (generale prevensi/pencegahan umum).

### **c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)**

Teori gabungan ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

Teori gabungan ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Kelemahan kedua teori tersebut menurut Koeswadji (Amir Ilyas, 2012: 101), adalah:

Kelemahan teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memeberikan pidana.

Kelemahan teori relatif:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik itu sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap resedive.

Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pembedaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa pembedaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata. Oleh karena itu, perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Jenis Pidana dan Pembedaan dalam KUHP**

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

- a. Pidana pokok meliputi :
  - ☐ Pidana mati;
  - ☐ Pidana penjara;
  - ☐ Pidana kurungan ;

- ☐ Pidana denda ;
- ☐ Pidana tutupan ;
- b. Pidana tambahan meliputi :
  - ☐ Pencabutan beberapa hak tertentu ;
  - ☐ Perampasan barang-barang tertentu ;
  - ☐ Pengumuman putusan hakim ;

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

#### **a. Pidana Pokok**

##### **1) Pidana Mati**

Dalam tata urutan stetsel pidana, maka pidana mati itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati (Bambang Waluyo, 2008:13) misalnya:

- a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 Ayat (2);
- c) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 Ayat (1);
- d) Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang, Pasal 124 Ayat (3);
- e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 Ayat (3) dan Pasal 340;
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang

menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4);

- g) Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis;
- i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129;
- j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).

Menurut ketentuan naskah KUHP (Bambang Waluyo, 2008:14-

15), hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati yaitu :

- a) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana mati.
- b) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 18 tahun.
- d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa itu sembuh.
- e) Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan presiden.
- f) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika :
  - ☐ Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - ☐ Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki;
  - ☐ Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan ada alasan yang meringankan;

- Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung;
- Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman.

## **2) Pidana Penjara**

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 91), menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh (1983:62), bahwa :

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2012:54)

menyatakan bahwa :

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (Tolib Setiady, 2010:92), yaitu :

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
8. Beberapa hak sipil yang lain.

### 3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam KUHP, bahwa:

Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289),

pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

- ☐ Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delictum, dan beberapa delictum, seperti perkawinan satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- ☐ Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.



Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

#### **4) Pidana Denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa :

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

#### **5) Pidana Tutupan**

Satu lagi pidana pokok yang di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh

maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

Didalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dalam Pasal 55 ayat (2) dan (5), Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 37 ayat (2). Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1948 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada nara pidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara

juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang itumaupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum diindonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada Tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.(Siti Maryam, "PidanaTutupan", [/http://notesoflaw.blogspot.co.id/2010/11/pidana-tutupan-dalam-peristiwa-3-juli.html](http://notesoflaw.blogspot.co.id/2010/11/pidana-tutupan-dalam-peristiwa-3-juli.html). diakses pada hari senin tanggal 12 September 2016 18.00 wita).

#### **b. Pidana Tambahan**

Sifat hukuman tambahan ini dijelaskan dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, Abdullah Marlang, dkk (2009:82) hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau ada dalam putusan hakim ditetapkan hukuman-hukuman tambahannya.

Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman di penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. (2011 : 82) yaitu :

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

PAF.Lamintang (1996:193-194) dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  - ☐ Unsur perbuatan;
  - ☐ Sifat melanggar hukum;
  - ☐ Kualitas dari si pelaku;
  - ☐ Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  - ☐ Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa).
  - ☐ Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ☐
  - ☐ Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308KUHP.

Simons (Sudarto,1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur objektif, terdiri atas :
  - 1) Perbuatan orang;
  - 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;

- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subjektif, terdiri atas :
  - 1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
  - 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh

Leden Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a) Unsur Subjektif  
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea)kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelapaaan (schuld).
- b) Unsur Objektif  
Merupakan unsur dari luar diri pelaku,yang terdiri atas :
  - 1) Perbuatan manusia, berupa :
    - ☐ Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;
    - ☐ Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;
  - 2) Akibat (Result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  - 3) Keadaan-keadaan (Circumstances)
    - ☐ Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
    - ☐ Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
    - ☐ Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah :

- ☐ Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- ☐ Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- ☐ Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- ☐ Unsur melawan hukum yang objektif;

## 5. Jenis Delik Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu.

Bambang Poernomo (1982:96) Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

### a) Delik Dolus dan Culpa

- Bambang Poernomo (1982:99-100) Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

### b) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis

- Zainal Abidin Farid (2009:177) Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.

- Delik Omissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

c) Delik Formil dan Delik Materiil

- Bambang Poernomo (1982:100) Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan.

d) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

- Bambang Poernomo (1982:102) Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.
- Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.

e) Delik Murni dan Delik Aduan

- Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan.
- Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi



dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

f) **Delik Selesai dan Delik Berlanjut**

- Bambang Poernomo (1982:101) Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP.
- Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

**C. Tindak Pidana Penipuan**

**1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Mengenai pengertian penipuan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

**a. Penipuan menurut tata bahasa**

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara

menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Ananda. S, 2009: 364).

#### **b. Menurut KUHP**

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP di atas, R.Sugandhi (1980: 396-397), memberikan penjelasan mengenai pengertian penipuan sebagai berikut:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan

menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:

**a. Unsur subyektif**

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

2) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang

artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

#### **b. Unsur obyektif**

##### **1) Unsur barangsiapa**

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2) Unsur perbuatan menggerakkan**

Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

### 3) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

### 4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

#### a) Menyerahkan benda

Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

#### b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian

atau perikatan. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

#### 5) Upaya-upaya penipuan

Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada beberapa cara, yaitu:

##### a) Menggunakan nama palsu

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak

diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu.

b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari warisan, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.

c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat



perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum *dictum* putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis).

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi,

hakim merupakan perumus dan penggali nilai- nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah- tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup alam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, terdapat kecendrungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan terdakwa
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yaitu “hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan)
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi
- e. faktor penyebab terjadinya pelanggaran
- f. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
- g. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering yaitu :

1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran

undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.

5. Ahmad Ali (2008:158) Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang Penulis teliti di Pengadilan Negeri Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

### 2. Studi dokumen

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

## **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 337/Pid.B/2016/Pn.Mks**

##### **1. Posisi Kasus**

Berdasarkan Putusan Nomor: 337/Pid.B/2016/Pn.Mks tentang kasus mengenai tindak pidana penipuan secara berlanjut, bahwa berawal terdakwa bernama Andi Dahlia, S.E bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan

segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.

Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa, lalu pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Reg. Perkara: PDM-144/Mks/Epp.2/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia, S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei sampai dengan September 2015, bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidak-tidaknya di suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :
  - Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba dating orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia,S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei sampai dengan September 2015, bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabata palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan

menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 Agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 30 September 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

No. Reg. Perk: PDM-144/Mks/Epp.2/02/2016 tanggal 25 April 2016

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa Andi Dahlia,S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Dahlia,S.E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 15 Tello Baru Makassar Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dikantor Notaris Rinaldi Iksan Basong,S.H
  - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran tanah Dikembalikan pada saksi Alpius Tanggo
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **4. Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 337/Pid.B/2016/Pn.Mks ini sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Andi Dahlia,S.E tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 15 Tello Baru Makassar; Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian perikatan jual beli di kantor Notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H;
  - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran tanah; Dikembalikan kepada saksi Alpius Tanggo.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Dengan melihat dan mencermati isi dakwaan jaksa penuntut umum, penulis menarik kesimpulan, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternative dengan dakwaan kesatu dengan pasal 372 KUHPidana mengenai penggelapan dan kedua dengan pasal 378 KUHPidana mengenai penipuan. Menurut penulis jaksa lebih memilih dakwaan alternative dibandingkan dengan dakwaan primer dikarenakan analisis jaksa apabila yang didakwakan hanya pasal 372 saja, dimana yang menjadi pokok pasal dalam tuntutan jaksa adalah pasal 378 “barang siapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang,” dan adapun jaksa memasukan pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut, dalam pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut untuk memperjelas kedudukan tersangka di pengadilan dan untuk juga menguatkan pasal 378 sebagai jaminan agar dipengadilan nantinya tidak terbukti dalam pasal 372 maka

terdakwa bisa saja lepas dari tuntutan oleh karena bukti yang didapat oleh jaksa belum cukup untuk memastikan terdakwa, oleh karena itu hanya perlu didakwakan pasal 378 KUHPidana saja untuk menghindarkan terdakwa lepas dari tuntutan maka jaksa lebih memilih dakwaan alternative. Menurut penulis keputusan jaksa lebih memilih untuk menggunakan dakwaan alternative sudah tepat. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya hakim hanya memeriksa sesuai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus diluar dari yang didakwakan jaksa penuntut umum. Bila kemudian dakwaan itu tidak terbukti unsur-unsurnya maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2016/PN.Mks**

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan secara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, factual, serta

visualisaisi etika dan moralitas hakim. Dapat diketahui juga ada beberapa pandangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yaitu pandangan normatif dan pandangan sosiologis, kedua pandangan ini sangat perlu diterapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan di hadapan pengadilan, adapun juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan itu yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadi subjek hukum sehingga hakim harus memakai dan meyakini bahwa pandangan sosiologis sangatlah perlu untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

### **1. Pertimbangan Hakim**

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh Andi Dahlia,S.E sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia,S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei sampai dengan September 2015, bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia,S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan

Mei sampai dengan September 2015, bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabata palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui

permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tanggal 16 Februari 2016 No : PDM-144/Mks/Epp.2/02/2016 yang berbunyi sebagai berikut : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan umum tersebut, oleh terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1.Jeacklin Karundeng 2.Katrina Tanngo 3. Alfius Tanngo sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dakwaan penuntut umum
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan pasal 372 dan 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasar dengan uraian dan pertimbangan diatas, menurut majelis semua unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian pidana pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik yang bersifat alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa ditahan sementara dan penahanan itu dilakukan secara



sah, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan karena itu di perintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban.
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan. Maka Majelis mempertimbangkan dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
3. Secara melawan hukum
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.
6. Perbuatan berlanjut.

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek atau manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Andi Dahlia, S.E yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim, penuntut umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa uang yang diterima telah oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah dinikmati oleh terdakwa yang mana telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur secara melawan hukum**

Bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat/sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan dalam mendapatkan keuntungan.

Suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menjual tanah milik terdakwa kepada saksi korban Alpis Tanggo seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan meminta kepada saksi korban agar memberikan uang panjar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat yang asli kepada saksi korban apabila kakak dari terdakwa tiba di makassar, merasa percaya saksi korban memberikan uang yang diminta oleh terdakwa namun setelah pemberian uang tersebut diketahui bahwa tanah milik terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada Hendrik Horas pada tahun 2013.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menjual tanah milik terdakwa kepada saksi korban Alpis Tanggo seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan meminta kepada saksi korban agar memberikan uang panjar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat yang asli kepada saksi korban apabila kakak dari terdakwa tiba di makassar, merasa percaya saksi korban memberikan uang yang diminta oleh terdakwa namun setelah pemberian uang tersebut diketahui bahwa tanah milik terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada Hendrik Horas pada tahun 2013.

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menjual tanah milik terdakwa kepada saksi korban Alpis Tanggo seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan meminta kepada saksi korban agar memberikan uang panjar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat yang asli kepada saksi korban apabila kakak dari terdakwa tiba di makassar, merasa percaya saksi korban memberikan uang yang diminta oleh terdakwa namun setelah pemberian uang tersebut diketahui bahwa tanah milik terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada Hendrik Horas pada tahun 2013.

Dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6. Unsur perbuatan berlanjut**

Bahwa dalam pasal 64 ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan disadari atau tidak disadari oleh terdakwa sejak menemui saksi korban Alpius Tanggo untuk meminta uang tambahan dimana terdakwa selalu menjanjikan bahwa sertifikat yang asli akan diberikan oleh terdakwa apabila kakak dari terdakwa datang ke makassar sehingga saksi korban merasa percaya dan memberikan uang kepada terdakwa dimana pada tanggal 06 mei 2015 terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 19 mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 04 juli 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 30 september 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **2. Analisis Penulis**

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan. Dari uraian penjelasan tentang pertimbangan hakim diatas maka penulis memperkuat analisis yang menjadi rumusan masalah dengan hasil wawancara penulis oleh hakim ketua Imam Supriyadi, S.H.,M.H selaku hakim yang memeriksa perkara pengadilan :

Beliau mengatakan bahwa “ sebelum menjatuhkan putusan hal utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim yaitu melihat perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap dari pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti lain yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat di peroleh suatu keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut”.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek yaitu dari hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta dari segala unsur-unsur yang terdapat di pasal 378 KUHPidana. Dalam hal ini hakim juga melihat dari aspek tuntutan penuntut umum yang dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sesuai mekanisme penjatuhan hukuman dibawah dari tuntutan penuntut umum. Putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materil pada Putusan No.337/Pid.B/2016/PN.Mks menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana, dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHPidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No.337/Pid.B/2016/PN.Mks. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam melakukan

perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Hakim juga melihat dan menimbang terlebih dahulu yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan terdakwa

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban.
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Keadaan yang meringankan terdakwa

- Terdakwa sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil



agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta yang timbul pada persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, Abdullah, dan Irwansyah, 2009. Pengantar Hukum Indonesia. AS.Center : Makassar ISBN.
- Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum. Edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk : Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana).PT Rajawali Pers : Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia : Yogyakarta.
- Andi Zaenal Abidin Farid, dan A. Hamzah, 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia). PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1982)
- Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan ppidanaan. Sinar Grafika : Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur, 2005. Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi). PT Refika Aditama : Bandung.
- Leden Marpaung, 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika : Jakarta.
- Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta : jakarta.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika. : Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam perspektif.

Aksara Baru : Jakarta.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto : Semarang

Tolib Setiady, 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta :Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, 1987. Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta.

### **Website**

<http://notesoflaw.blogspot.co.id/2010/11/pidana-tutupan-dalam-peristiwa-3-juli.html>.